

Pemkab Tangerang Aktifkan Kembali Hotel sebagai Tempat Isolasi Terpadu

TANGERANG (IM)

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengaktifkan kembali dua tower di Hotel Yasmin sebagai tempat isolasi terpadu bagi pasien Covid-19, seiring meningkatnya kasus aktif penularan virus corona di daerah itu sejak beberapa pekan terakhir.

"Ada peningkatan yang cukup signifikan, jadi sekarang kita buka kembali Hotel Yasmin sebagai tempat isolasi terpadu sebanyak dua tower. Dan saat ini sudah terisi sebanyak 152 kamar, mungkin nanti ada penambahan lagi sebanyak 39 orang," kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar usai meninjau langsung bersama Kapolda Banten Iriji Pol Rudy Heryanto ke Hotel Yasmin di Tangerang seperti dilansir Antara, Selasa (1/2).

La mengatakan, keterisian tempat isolasi terpadu itu, kini sudah terisi sebanyak 152 kamar dan kemungkinan nantinya akan bertambah lagi seiring meningkatnya kasus aktif di Kabupaten Tangerang.

Selain itu, dalam penemuan kasus baru Covid-19 tersebut didominasi dari kluster keluarga dan menjadi pasien terbanyak yang dirawat di tempat isolasi terpadu di Hotel Yasmin. "Untuk kasus aktif di Kabupaten Tangerang rata-rata dari kluster keluarga, dan dilakukan perawatan di hotel tersebut. Selain itu ada juga warga asal kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang dirawat di sini juga," katanya.

Oleh karena itu, kata Zaki, langkah upaya untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Maka pihaknya telah menyiapkan sebanyak 240 kamar yang siap ditempati oleh pasien isolasi Covid-19. "Kapasitas saat ini ada 240 kamar dan bisa kurang lebih hampir sekitar 300 kamar untuk keluarga, jadi satu kamarnya bisa dipakai tiga orang atau lebih," ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Banten melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silintonga menambahkan bahwa pemerintah daerah kini harus ada beberapa yang harus diperhatikan secara serius, seperti memperhatikan ketersediaan obat-obatan, kapasitas tempat perawatan pasien dan ketersediaan tabung oksigen. "Pak Kapolda mengingat tentang kesiapan oksigen, dan meningkatkan tracing dari mereka yang sudah terkena Covid-19, jadi saat ini juga ada peran dari Polisi dan TNI," tambahnya.

La mengungkapkan, untuk daerah di Provinsi Banten yang masih tinggi ditemukan kasus Covid-19 yaitu masih berada di wilayah Tangerang dan disusul wilayah Kota Cilegon yang mana memang wilayah tersebut menjadi tempat akses mobilitas masyarakat dari luar daerah.

"Wilayah Tangerang masih tinggi, tetapi di Cilegon juga saat ini ada sekitar 30 kasus terinfeksi Covid-19, karena mobilitas masyarakat yang melintas di pelabuhan ini juga menjadi konsen untuk bisa di cek kembali," kata dia. ● yy



IDN/ANTARA

PELANTIKAN PNS DI BANTEN

Wali Kota Serang Syafrudin (kanan) menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan PNS kepada CPNS yang dinyatakan lulus saat upacara pelantikan PNS di Serang, Banten, Rabu (2/2). Pelantikan 115 orang yang dinyatakan lulus seleksi PNS tahun anggaran 2019 tersebut baru bisa digelar saat ini karena terhambat pandemi COVID-19.

Pemprov Banten Terapkan PTM 25 Persen

Tabrani juga secara tegas mengungkapkan, jika ada sekolah yang ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka sekolah tersebut harus menghentikan kegiatan PTM dan beralih Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seluruhnya.

SERANG (IM) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebesar 25 persen. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 443/204-DinKes/2022 tanggal 27 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)

Provinsi Banten Tabrani mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai turunan SE Gubernur Banten di atas, untuk seluruh sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten. "Hari ini, Senin (31/1), saya sudah mengeluarkan surat edaran yang langsung disebar ke

sekolah-sekolah untuk ditindaklanjuti," katanya di laman resmi Pemprov Banten, Selasa (1/2).

Sampai saat ini, Dindikbud Provinsi Banten sudah menemukan beberapa kasus terkonfirmasi positif Covid-19, terutama di wilayah Tangerang Raya. Untuk itu pihaknya memperketat Prokes ketika PTM diberlakukan.

Tabrani juga secara tegas mengungkapkan, jika ada sekolah yang ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka sekolah tersebut harus menghentikan kegiatan PTM dan beralih Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seluruhnya.

"Selama dua pekan pertama sekolah tersebut wajib melaksanakan PJJ, sambil juga melakukan tracing dan testing

minimal kepada orang-orang yang ada di dalam kelas itu yang dilakukan oleh Satgas sekolah yang sudah bekerjasama dengan Faskes terdekat," jelasnya.

Dikatakan Tabrani, Satgas di setiap sekolah itu memang tidak diatur dalam SE yang dikeluarkannya. Hal itu mengantisipasi pembentukan Satgas itu sudah dilakukan sejak pertama kali PTM diberlakukan.

"Itu sudah sesuai dengan arahan SKB Empat Menteri, dan setiap sekolah wajib mempunyai ruang isolasi dan membangun komunikasi dengan Puskesmas setempat serta penerapan Prokes secara ketat," ucapnya.

Diungkapkan Tabrani, untuk pelaksanaan vaksinasi booster kepada tenaga pendidik,

pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten.

Namun persoalannya, karena mekanisme vaksinasi booster ini berbasis wilayah, sehingga belum bisa dilakukan secara kolektif seperti pada saat pelaksanaan vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua yang dilaksanakan di RSUD Banten.

Oleh karena itu, Tabrani menghimbau kepada para guru yang hendak melakukan vaksinasi booster, bisa dilakukan di wilayahnya masing-masing yang sudah memenuhi standar pelaksanaan, seperti wilayah Tangerang Raya. "Silahkan datang langsung ke lokasi tempat vaksinasi booster di masing-masing wilayah," tuturnya. ● yan

Produksi Beras di Kota Bandung Bisa Meningkatkan Dua Kali Lipat

BANDUNG (IM) - Demi meningkatkan produksi beras di Jawa Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menggalakkan Indeks Pertanian (IP) 400 pada 70 ha lahan persawahan di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Bandung.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, dengan IP 400 ini, Bandung bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. "Kebutuhan pangan Kota Bandung itu 96,47 persen berasal dari daerah lain. Semoga dengan rekayasa teknologi ini, 767 ha lahan persawahan yang kita punya bisa dioptimalkan," ujar Yana saat menghadiri peresmian penanaman padi IP 400 di Derwati, seperti dilansir dari website resmi Kota Bandung, Rabu (2/2).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengungkapkan, dengan IP 400 ini, para petani bisa panen empat kali dalam setahun. "Biasanya Kota Bandung tanam dan panen itu dua kali dalam setahun. Dari 767 ha lahan persawahan yang tersedia, kita baru berani memulai IP 400 di 70 ha," ungkap Gin Gin.

Menurut Gin Gin, keputusan ini melihat dari kondisi Kota Bandung yang belum bisa menyediakan lahan pertanian ideal. "Kita memiliki beberapa kendala terkait dengan pertanian yang ideal, salah satunya adalah kualitas air irigasi. Mudah-mudahan dengan contoh tahun ini kita

memulai di 70 ha di Rancasari yang dikelola oleh lima kelompok tani, bisa menginspirasi kelompok tani lainnya," imbuhnya.

Kota Bandung merupakan kota pertama di Jawa Barat (Jabar) yang melaksanakan IP 400. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jabar, Kusnadi mengatakan, jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ketersediaan beras di Jabar per kapita per tahun bisa mengalami defisit.

Pada 2021, berdasarkan data KSA, produksi padi di Jabar sudah mencapai 9,3 juta ton. Jika dikonversikan ke beras, maka mencapai 5,5 juta ton. "Kalau kita pakai perhitungan dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) kebutuhan per kapita per tahun beras kita ada di posisi 4,5 juta ton. Kita masih surplus karena berada di 5,5 juta ton. Namun, jika menggunakan perhitungan BPS, kebutuhan per kapita per tahun beras Jabar adalah 6,5 juta. Artinya Jabar minus atau defisit," paparnya.

Maka, Kusnadi berharap, dengan terobosan IP 400 ini, Kota Bandung bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pun dengan Jabar, bisa berkontribusi terhadap capaian produksi nasional. "Karena dari angka 9,3 juta ton padi yang kita hasilkan, Jabar telah memberikan kontribusi sebesar 16,53 persen untuk pangan nasional. Dengan kondisi ini, Jabar menempati posisi ketiga dari produksi padi," tutur Kusnadi. ● yy

115 PNS Baru di Pemkot Serang Dilantik

SERANG (IM) - Sebanyak 115 PNS diambil sumpahnya oleh Wali Kota Serang H.Syafrudin pada rangkaian apel pagi di halaman Puspemkot Serang dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin, Kepala BKPSDM Kota Serang Ritadi, Asda II Setda Kota Serang Yudi Suryadi, Asda III Setda Kota Serang Imam Rana, Rabu (2/2).

Perlu diketahui bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang menerima Surat Keputusan Peningkatan Status dari CPNS menjadi PNS terhenti mulai tanggal 2 Februari berjumlah 115 orang terdiri dari fungsional tertentu (guru) golongan III 88 orang, fungsional tertentu (guru) golongan II 9 orang, fungsional umum (tenaga teknis) golongan III 18 orang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Syafrudin mengimbau para PNS yang baru dilantik untuk disiplin dalam pekerjaan, menger-

jakan pekerjaan dari pimpinan. "Sikap ini dapat membangun etos kerja yang baik dan meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja," ujar Syafrudin di laman Pemkab Serang, Rabu (2/2).

Ia berharap para PNS meningkatkan kinerjanya, karena ketika sudah disumpah/berjanji menjadi PNS, maka hak dan kewajiban harus dijalankan dengan baik. "Dengan sudah dilantiknya menjadi PNS, diimbau saudara-saudara untuk disiplin. Saya mengharapkan semua yang dilantik menjalankan amanah," kata Syafrudin

Syafrudin menambahkan bahwa jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS saat ini masih terbilang kurang, terutama kepada tenaga teknis. "Tenaga teknis ini kan banyak yang pensiun, banyak yang pindah, dan usulan kami setiap tahun itu ada, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa terpenuhi seluruhnya." ujarnya. ● pra

Ketua DPRD Kab. Bogor Desak APH Selidiki Temuan Telur Busuk dalam Paket BPNT



BOGOR (IM) -Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susanto mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar menyelidiki temuan telur busuk dalam paket Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima warga Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

"BPNT (bantuan pangan non tunai) isi sembako kurang layak kami minta ini agar aparat penegak hukum harus menyelidiki apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan," kata Rudy Susanto, Selasa (1/2).

Menurut Rudy, aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan, terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

"Maka, aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu," ujarnya.

Secara tegas, Rudy juga mengingatkan siapa pun bermain-main dengan bantuan untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bogor. Korupsi secara umum dilarang, apalagi yang dikorupsi keringat dan perut orang tidak mampu. Ia meminta aparat hukum bertindak cepat menyelidiki dan aparat rakyat kecil dan kurang mampu. Keterlambatan jika bantuan yang tidak seberapa itu masih harus tidak layak," tandasnya. ● gio

"BPNT itu nilainya hanya Rp200 ribu dalam bentuk paket sembako. Bantuan itu saja tidak

bisa menghidupi mereka satu bulan penuh. Ini hanya berupa subsidi dari pemerintah. Apabila memang ada yang bermain, ingat yang memproses bukan hanya hukum negara tapi hukum Tuhan pun akan berjalan," tegasnya.

Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan bahwa ada ketidaksejajaran, kata Rudy, penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.

"Perlu diingat kepada siapa pun untuk tidak bermain-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di daerah ini," tegasnya.

Menurut Rudy dari fraksi Gerindra itu, yang dapat menyimpulkan adanya faktor kesenjangan ataupun ketidaksejajaran tersebut ialah aparat hukum. Oleh karena itu, sambungnya, harus dilakukan penyelidikan mendalam guna kepastian hukum.

"Apabila terbukti ada unsur kesenjangan, saya berharap aparat tidak ragu memberikan ketegasan di mata hukum. Sebab penerima BPNT ini yang terima rakyat kecil dan kurang mampu. Keterlambatan jika bantuan yang tidak seberapa itu masih harus tidak layak," tandasnya. ● gio



IDN/ANTARA

PELESTARIAN KORAN MONUMEN PERS NASIONAL

Pegawai bagian Konservasi Preservasi memperbaiki koran lama koleksi Museum Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/2). Kegiatan tersebut sebagai upaya pelestarian koran terbitan lama dari berbagai media dan surat kabar di Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan proses alih media digital guna mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi.

Disdukcapil Keliling Berikan Pelayanan Adminduk Sehari Jadi

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan 13 Kecamatan, tengah memberikan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan gratis sehari jadi. Pelayanan tersebut, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Kota Tangerang untuk memperjelas HUT Kota Tangerang ke-29.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil, Sri Warsini mengungkapkan pelayanan keliling sehati jadi ini meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah Kependudukan, e-KTP rekam baru hingga Kartu Identitas Anak (KIA). "Pelayanan ini dijalan oleh seluruh Kecamatan selama Februari ini. Kemoga lewat program ini, administrasi kependudukan masyarakat lebih lengkap. Selain itu, memudahkan, mendekatkan, tidak ada lagi kata malas atau besok-besok aja untuk urusan adminduk," ungkap Sri, Rabu (2/2).

Sementara itu, Kecamatan Neglasari menggelar pelayanan adminduk keliling yang ber-

langsung setiap Rabu, diluar pelayanan harian di kecamatan dan kelurahan. Camat Neglasari, Sanny Soniawan menjelaskan setiap pelayanan keliling setidaknya 150 hingga 200 warga terlayani. "Pada pelayanan adminduk keliling, Kecamatan Neglasari terfokuskan pada pembuatan Kartu Identitas Anak. Karena, berdasarkan situasi lapangan KIA paling banyak yang belum dimiliki warga Kecamatan Neglasari. Dengan itu, KIA lah yang kita kejar dapat pelayanan keliling ini," katanya.

Ia pun menuturkan, minggu ini pelayanan keliling berlangsung di Kelurahan Karang Anyar. Kata Sanny, tidak menutup kemungkinan pelayanan keliling akan berlangsung hingga beberapa bulan kedepan, dengan melihat antusias masyarakat Kecamatan Neglasari. "Untuk permohonan pembuatan adminduk, atau mau tau kapan jadwal kelurahannya, bisa tanyakan langsung ke kelurahan masing-masing. Saya harap, masyarakat dapat memanfaatkan program pelayanan keliling ini sebaik mungkin. Jangan lewatkan, mudah, cepat dan gratis," ujarnya. ● yy



IDN/ANTARA

KERAJINAN TENUN IKAT KHAS KEDIRI

Perajin memintal benang katun sebagai bahan baku kain tenun di sentra industri tenun ikat khas Kediri, Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (2/2). Pemkot Kediri mengimbau instansi negeri maupun swasta menggunakan baju dari bahan tenun ikat setiap hari Kamis guna mendorong pertumbuhan kerajinan tenun ikat khas Kediri.

Pemkab Purbalingga Antisipasi Lonjakan Covid-19

PURBALINGGA (IM)

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mempersiapkan sejumlah upaya strategis guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di wilayah setempat. "Kami tengah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi menyusul adanya tren peningkatan kasus Covid-19," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/2).

Dia menjelaskan berdasarkan data hingga 2 Februari 2022 diketahui bahwa kasus aktif Covid-19 di Purbalingga sebanyak 36 orang, sembilan di antaranya menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat dan sisanya melakukan isolasi mandiri.

Jumlah tersebut, kata dia, mengalami peningkatan jika dibandingkan data kasus aktif pada tanggal 29 Januari 2022 yang sebanyak 23 orang. "Hal ini menunjukkan mulai merebaknya kembali kasus positif Covid-19 sehingga kami telah menyelenggarakan rapat koordinasi penangan Covid-19 yang dihadiri seluruh instansi terkait, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama TNI dan Polri akan mengambil langkah-langkah antisipasi," katanya.

Pihaknya juga akan memasang lembaran kertas atau stiker yang ditempelkan di rumah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalankan isolasi mandiri. "Kami akan memasang stiker di depan rumahnya dengan tujuan agar pemerintah bisa memantau pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri dan jelas kapan mulai dan berakhirnya masa isolasi tersebut," katanya.

Pihaknya juga meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap kegiatan kemasyarakatan dan pembelajaran tatap muka bagi siswa di sekolah-sekolah. "Kegiatan kemasyarakatan tidak dilarang namun perlu dilakukan pembatasan dan perlu memperkuat penerapan protokol kesehatan jangan sampai ada pelanggaran," katanya.

Dia juga meminta seluruh sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk memastikan protokol kesehatan sudah benar-benar dijalankan termasuk pengecekan suhu dan kesehatan siswa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar.

"Kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk lebih memperhatikan lagi para siswanya. Jika ada yang terindikasi batuk pilek segera lapor dan akan ditindaklanjuti untuk memastikan apakah itu positif Covid-19 atau tidak," katanya. ● pp